



RENCANA KERJA TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

SETWAN
KOTA BLITAR

Jl. Ahmad Yani No.19,
Sananwetan, Kota Blitar,
Jawa Timur 66137

Telp. (0342) 801602

<https://dprd.blitarkota.go.id/>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 telah selesai disusun. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Renja ini mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2026, serta mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Diharapkan, Renja ini dapat menjadi landasan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, serta akuntabel.

Secara substansial, program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025–2029, serta mengacu pada kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029. Renja ini diharapkan mampu mendukung peran Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif, fasilitatif, dan substantif kepada unsur-unsur DPRD secara optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen Renja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi panduan yang tepat dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar di tahun 2026.

Blitar,
Sekretaris DPRD Kota Blitar,

Dra. Eka Atikah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196808121988032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - i -

DAFTAR ISI - ii -

DAFTAR TABEL..... - iii -

BAB I PENDAHULUAN..... - 1 -

 1.1. Latar Belakang - 1 -

 1.1.1 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). - 2 -

 1.1.2 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar. - 2 -

 1.1.3 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi..... - 3 -

 1.1.4 Rencana Kerja dan Tindak lanjutnya dalam APBD - 3 -

 1.2 Landasan Hukum..... - 3 -

 1.3. Maksud dan Tujuan..... - 5 -

 1.4. Sistematika Penulisan..... - 5 -

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN LALU - 7 -

 2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar. - 7 -

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar - 21 -

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar..... - 23 -

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 - 31 -

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat - 32 -

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... - 33 -

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... - 33 -

 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR - 33 -

 3.3. Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar..... - 37 -

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. - 42 -

 4.1 Tabel Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2024 - 42 -

 4.2 Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 - 43 -

BAB V PENUTUP - 48 -

 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja - 48 -

 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan - 48 -

 5.3 Rencana Tindak Lanjut - 49 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra PD s/d Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Blitar... - 12 -

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar - 22 -

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kota
Blitar Tahun 2026..... - 24 -

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Pada Sekretariat DPRD Kota Blitar - 32 -

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar
Tahun 2026 - 34 -

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah - 36 -

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027 - 37 -

Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 - 38 -

Tabel 4. 1 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2024 - 42 -

Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar..... - 43 -

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara herarki Rencana Kerja berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- Renstra Perangkat Daerah,
- Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu,
- Hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 hasil review yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta Perkiraan Maju pendanaan;
2. Berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
3. Berpedoman pada hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar;
4. Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
5. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD tahun 2026.

1.1.1 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan rencana kerja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2026.

1.1.2 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar juga berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar. Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 harus berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

1.1.3 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Sekretariat DPR RI serta DPRD Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Rencana Kerja Sekretariat DPR RI dan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Program DPR RI dan DPRD provinsi Jawa Timur yang dapat berpengaruh langsung terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2026.

1.1.4 Rencana Kerja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026. Sedangkan RKA Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor ...);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23); → sesuai OPD
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | |
|--------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| | | 1.1 Latar Belakang |
| | | 1.2 Landasan Hukum |
| | | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | : | Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu |

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar
- BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar disajikan sebagai salah satu fungsi untuk peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar di tahun yang direncanakan dengan mengacu pada hasil kinerja tahun lalu guna mengetahui:

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 2. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 3. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. Implikasi atau suatu akibat yang timbul terhadap capaian target program Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar;
 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar serta hambatan dan permasalahan yang harus dihadapi sekaligus pengambilan sikap sebagai tindakan solusinya.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD kota Blitar tahun lalu (2025) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2027) dengan mengacu pada APBD tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPRD Kota Blitar berdasarkan realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n-2) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Orientasi DPRD
 2. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 3. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 6. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sedang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2025 (n - 1) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
 6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sebagai fasilitator Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD maka Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Renstra 2021-2026 menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD”. Dari Tujuan yang telah ditetapkan maka Sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah
3. Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun lalu (tahun 2024) dan tahun berjalan (tahun 2025) serta tahun yang direncanakan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Diisi indikator kinerja tujuan/ sasaran/ program / kegiatan/ sub kegiatan sesuai tabel 6.3 perubahan renstra 2021-2026</i>	<i>Diisi target kinerja tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan akhir periode renstra sesuai tabel 6.3 perubahan renstra 2021-2026</i>	<i>Diisi realisasi kinerja tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan tahun 2023</i>	<i>Diisi target tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024 sesuai tabel 3 perubahan renja 2024</i>	<i>Diisi realisasi tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024</i>	<i>kolom 7/ kolom 6</i>	<i>Diisi target kinerja tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2025 sesuai tabel 4 renja tahun 2025</i>	<i>Kolom 5 + kolom 7 + kolom 9 (Tidak berarti dijumlah tergantung nomenklatur indikatornya)</i>	<i>Kolom 10 dibagi kolom 4</i>
4.02.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5	2	2	12	600	3	17,00	340
4.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	96	0	24	24	100	25	49,00	51,04
4.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	263	0	0	0	0	24	24,00	9,13
4.02.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30	0	0	0	0	10	10,00	33,33
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100,00	100
4.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	12	12	12	100	12	36,00	75,00
4.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	12	12	12	100	12	36,00	75
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100,00	100
4.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	116	45	29	29	100	29	103,00	88,79
4.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	356	104	89	89	100	89	282,00	79,21
4.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	52	16	13	2	15,38	13	31,00	59,62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Diisi indikator kinerja tujuan/sasaran/program /kegiatan/sub kegiatan sesuai tabel 6.3 perubahan renstra 2021-2026	Diisi target kinerja tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan akhir periode renstra sesuai tabel 6.3 perubahan renstra 2021-2026	Diisi realisasi kinerja tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2023	Diisi target tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 sesuai tabel 3 perubahan renja 2024	Diisi realisasi tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024	kolom 7/kolom 6	Diisi target kinerja tujuan/sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2025 sesuai tabel 4 renja tahun 2025	Kolom 5 + kolom 7 + kolom 9 (Tidak berarti dijumlah tergantung nomenklatur indikatornya)	Kolom 10 dibagi kolom 4
4.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	304	8	76	2	2,63	5	15,00	4,93
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	100	100	100	100	100,00	100
4.02.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100	25	25	25	100	25	75,00	75
4.02.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	56	25	14	14	100	14	53,00	94,64
4.02.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	100	48	25	23	92	25	96,00	96
	Tujuan : Meningkatkan kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitas Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82	90,125	81	90,975	112,31	81,5	90,975	110,95
	Sasaran : Meningkatkan Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	82	90,25	81	91,75	113,27	81,5	91,75	111,89
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	100	100	100	100	100,00	100
4.02.02.1.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100	100	100	100	100	100	100,00	100
4.02.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20	10	5	5	100	5	20,00	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Diisi indikator kinerja tujuan/ sasaran/ program / kegiatan/ sub kegiatan sesuai tabel 6.3 perubahan renstra 2021-2026	Diisi target kinerja tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan akhir periode renstra sesuai tabel 6.3 perubahan renstra 2021-2026	Diisi realisasi kinerja tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan tahun 2023	Diisi target tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024 sesuai tabel 3 perubahan renja 2024	Diisi realisasi tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024	kolom 7/kolom 6	Diisi target kinerja tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2025 sesuai tabel 4 renja tahun 2025	Kolom 5 + kolom 7 + kolom 9 (Tidak berarti dijumlah tergantung nomenklatur indikatornya)	Kolom 10 dibagi kolom 4
4.02.02.1.03.07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48	24	12	12	100	12	48,00	100
4.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah	8	2	2	2	100	2	6,00	75
4.02.02.1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	100	100	100	100	100	100,00	100
4.02.02.1.05.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	275	150	50	50	100	75	275,00	100

Keterangan:

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Blitar di atas, terdapat penjabaran mengenai:

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, terdiri atas:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, terdiri atas:
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 9. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 11. Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu
 12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 13. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 14. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 18. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 19. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 21. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 22. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 23. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 24. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 25. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang- undangan

26. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
27. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
28. Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD
29. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
30. Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
31. Sub Kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi
32. Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD
33. Sub Kegiatan Orientasi DPRD
34. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
35. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
36. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
37. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
38. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
39. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
40. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
41. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
42. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
43. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
3. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target pada tahun 2024 sebesar 81 dengan realisasi sebesar 89,90.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, dan atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
Dikarenakan efisiensi anggaran.
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Disebabkan karena efisiensi anggaran.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
Disebabkan karena efisiensi anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian target Program Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.
Keberhasilan capaian Program dan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota akan mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD Kota Blitar. IKM Sekretariat DPRD merupakan nilai rata-rata dari 3 Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan, dan Bagian Pengawasan dan Penganggaran. Sedangkan untuk tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu “Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD” dan “Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah” akan mendukung Indeks Kinerja Utama (IKU) dari Sekretariat DPRD Kota Blitar.

6. Kebijakan untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dalam menjawab permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026, antara lain:
 1. Mengawal dan menjaga konsistensi rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu.
 2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan profesionalisme aparatur.
 3. Meningkatkan peran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
 4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar

Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang tercantum dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022, yaitu:

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar antara lain adalah :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dilihat dari fungsi Sekretariat DPRD maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Sekretariat DPRD terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. Fungsi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD,
2. Fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD terhadap dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yaitu: Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi diatas Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unsur pelayanan dan fasilitator tugas dan fungsi dewan, maka keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Untuk itu sebagai bahan evaluasi dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar, maka ditetapkan target tingkat capaian kinerja pelayanan yang dijadikan tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian pelayanan kinerja secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar

Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Analisis
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, IKU, IKK, SPM PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026	SESUAI KATEGORI INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022 PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026	TARGET TAHUN 2023 PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026	TARGET TAHUN 2024 PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026/PERUBAHAN RENJA 2024	TARGET TAHUN 2025 PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026/RENJA 2025	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	PROYEKSI REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	
Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD		80	80,5	81	81,5	80	90,125	90,975	81,5	82	82,5	Hasil survey telah memenuhi target yang telah ditentukan
Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	IKU	80	80,5	81	81,5	80	90,25	91,75	81,5	82	82,5	Hasil survey telah memenuhi target yang telah ditentukan
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	IKU	80	80,5	81	81,5	80	90	90,2	81,5	82	82,5	Hasil survey telah memenuhi target yang telah ditentukan
Nilai Sakip Perangkat Daerah		A (85)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (85,06)	A (82,39)	A (86,11)	A (86)	A (86,5)	A (87)	Realisasi Nilai SAKIP telah memenuhi target

Pada Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024, 2025, proyeksi tahun 2026 dan 2027 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sebagai indikator tujuan, sasaran, IKU. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- Realisasi indikator tujuan, sasaran, IKU tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- Semua realisasi indikator tujuan, sasaran, IKU telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja adalah pada nilai IKM, pada tahun 2023 menggunakan aplikasi e-Sukma yang sebelumnya menggunakan manual, namun pada tahun 2024 dan berikutnya tidak merubah target yang ada di Renstra hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 akan dilantik anggota DPRD yang baru untuk masa periode 2024-2029. Dalam hal ini kedepan Sekretariat DPRD Kota Blitar akan tetap meningkatkan kinerjanya agar tercapai target yang lebih baik;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Sekretariat DPRD adalah berdasarkan data di atas dengan adanya peningkatan target kinerja sehingga fasilitasi pelayanan di Sekretariat DPRD telah berjalan dengan baik.
- Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil adalah dengan menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta menyesuaikan alokasi dengan prioritas pembangunan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan Perwali No 56 Tahun 2022 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Adapun Isu-isu strategis yang digunakan sebagai catatan dalam menentukan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu “Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD” dan “Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah” adalah:

- a. Kewenangan pengambilan keputusan baik yang bersifat strategis maupun teknis dalam melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan sepenuhnya ada pada DPRD melalui Badan Musyawarah.
- b. Belum adanya kesepahaman persepsi antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD utama dalam menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan.

C.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026					
	Sekretariat DPRD				35.335.707.743,00	Sekretariat DPRD				36.991.260.038,00	Penyesuaian kebutuhan anggaran sesuai Renja DPRD dan penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				35.335.707.743,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36.991.260.038,00	Penyesuaian kebutuhan anggaran sesuai Renja DPRD dan penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
	SEKRETARIAT DPRD				35.335.707.743,00	SEKRETARIAT DPRD				36.991.260.038,00	Penyesuaian kebutuhan anggaran sesuai Renja DPRD dan penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	20.344.455.409,00	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	20.619.480.209,00	Adanya penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	19.037.325,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	28.667.325,00	Adanya penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.196.500,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.196.500,00	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	4.997.400,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	4.997.400,00	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	4.830.000,00	Penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4.999.200,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4.999.200,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	2.844.225,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	2.844.225,00	
						Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	4.800.000,00	Penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.399.079.061,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.399.079.061,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.393.804.061,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	3.393.804.061,00	Penyesuaian target agar capaian target kinerja sesuai
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12 Laporan	5.275.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12 Laporan	5.275.000,00	
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	4.920.000,00	Penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	4.920.000,00	Penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	267.805.800,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	267.805.800,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	59.125.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	59.125.000,00	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	208.680.800,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	208.680.800,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	843.978.400,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	843.978.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026					
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.048.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.048.500,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	95.896.900,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	95.896.900,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	46.105.400,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	46.105.400,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.520.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.520.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.219.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.219.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	21.954.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	21.954.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	257.986.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	257.986.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	183.679.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	183.679.000,00	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	99.569.600,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	99.569.600,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	348.385.400,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	623.410.200,00	Penambahan pengadaan mebel dan peralatan mesin lainnya dalam rangka peremajaan sarana prasarana dan pendukung kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	99.143.200,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	187.721.600,00	Penambahan pemenuhan mebel gedung paripurna
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	249.242.200,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	435.688.600,00	Penambahan alat pendukung kinerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026					
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.283.259.200,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.283.259.200,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	201.420.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	201.420.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.081.839.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.081.839.200,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	808.033.670,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	808.033.670,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	169.549.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	169.549.200,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	189.793.700,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	189.793.700,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	68 Unit	49.813.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	68 Unit	49.813.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	182.397.770,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	182.397.770,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	216.480.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	216.480.000,00	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	13.374.876.553,00	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	13.360.326.553,00	Penyesuaian selisih perhitungan (akres gaji dan tunjangan DPRD)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	12.910.324.453,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	300 Orang/Bulan	12.895.774.453,00	Penyesuaian target agar capaian target kinerja sesuai
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	389.552.100,00	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	389.552.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.456.479.738,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.492.817.199,00	
	1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100%	7.593.347.234,00	1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100%	8.318.322.434,00	Penyesuaian kebutuhan pembahasan raperda
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	2.464.606.250,00			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	3.120.158.545,00	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	100%	2.464.606.250,00	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	100%	3.120.158.545,00	Penyesuaian kebutuhan sesuai renja DPRD
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	270.833.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	270.833.000,00	
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	1.901.120.250,00	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	1.901.120.250,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	144.912.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	526.202.295,00	Penyesuaian kebutuhan sesuai renja DPRD dan pembahasan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	150.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	150.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	272.003.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	272.003.000,00	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD sesuai standart	100%	2.590.140.129,00	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD sesuai standart	100%	2.590.140.129,00	
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.575.536.654,00	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.575.536.654,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	170.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	170.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026					
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	342.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	342.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	72.369.675,00	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	72.369.675,00	
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	430.233.800,00	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	430.233.800,00	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Layanan Administrasi Tugas DPRD sesuai Standart	100%	5.003.207.105,00	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Layanan Administrasi Tugas DPRD sesuai Standart	100%	5.728.182.305,00	Penyesuaian kebutuhan sesuai renja DPRD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinas dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	4.900.207.105,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	5.625.182.305,00	Penyesuaian kebutuhan sesuai renja DPRD
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	103.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	103.000.000,00	
	2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran	100%	2.504.587.500,00	2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran	100%	2.504.587.500,00	
			Persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	2.428.711.350,00			Persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	2.428.711.350,00	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai aturan	100%	2.504.587.500,00	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai aturan	100%	2.504.587.500,00	
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	485.390.100,00	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	485.390.100,00	
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	502.855.800,00	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	502.855.800,00	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	507.019.000,00	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	507.019.000,00	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	502.439.500,00	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	502.439.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	(1)					(2)					
	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026					
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	506.883.100,00	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	506.883.100,00	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang Difasilitasi	100%	724.260.100,00	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang Difasilitasi	100%	724.260.100,00	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	269.139.500,00	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	269.139.500,00	
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	455.120.600,00	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	455.120.600,00	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Aspirasi Masyarakat Hasil Reses yang Ditindaklanjuti menjadi Dokumen Pokir	100%	1.704.451.250,00	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Aspirasi Masyarakat Hasil Reses yang Ditindaklanjuti menjadi Dokumen Pokir	100%	1.704.451.250,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	29.908.800,00	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	29.908.800,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.674.542.450,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.674.542.450,00	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD adalah:

"Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan". Berdasarkan tema tersebut, ditetapkan lima prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2026, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dan UMKM.
3. Penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan pelayanan publik yang prima.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berperan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama pada **prioritas ke-4**, yaitu:

"Penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan pelayanan publik yang prima". Dukungan ini dilakukan melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 adalah sebagaimana berikut:

- a) Adanya penambahan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah, yaitu:
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 2. Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.
 3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- b) Adanya penyesuaian pagu, yaitu:
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel untuk penambahan pemenuhan mebel gedung paripurna.
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk penambahan alat pendukung kinerja.
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan untuk penyesuaian kebutuhan sesuai renja DPRD dan pembahasan.
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD untuk penyesuaian kebutuhan sesuai renja DPRD.
- c) Adanya perubahan target, yaitu:
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD untuk penyesuaian target kinerja agar target kinerja sesuai.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk penyesuaian target kinerja agar target kinerja sesuai.
- d) Adanya pengurangan pagu, yaitu:
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD untuk Penyesuaian selisih perhitungan (akres gaji dan tunjangan DPRD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya, pada Sekretariat DPRD Kota Blitar tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada Sekretariat DPRD Kota Blitar, hal ini disebabkan karena Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2022 bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Pada Sekretariat DPRD Kota Blitar

No.	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	USULAN POKPIR/MUSREN BANG/HIBAH	PEMETAAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (APABILA DIAKOMODIR)	USULAN POKPIR/ MUSRENBANG/HIBAH	INDIKATOR KINERJA OUTPUT ATAS USULAN POKPIR/ MUSRENBANG/HIBAH	TARGET INDIKATOR KINERJA OUTPUT ATAS USULAN POKPIR MUSRENBANG/HIBAH	KETERANGAN DIAKOMODIR / TIDAK DIAKOMODIR
		N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan yang secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tertuang dalam Prioritas Nasional 7, yaitu Transformasi pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP 2026 menekankan pendekatan transformasional yang berorientasi pada hasil, dengan dukungan penguatan kelembagaan, tata kelola digital, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Dalam rangka mendukung tema dan prioritas nasional tersebut, Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, berkewajiban melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan dirumuskannya tujuan, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar memiliki arah untuk melaksanakan rencana kerja dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya, sumber dana (anggaran) dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar utama dalam pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”

Untuk lebih jelasnya disajikan Tujuan dan Sasaran serta target capaian kinerja pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3. 1
Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kota Blitar
Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target		Keterangan
					2023	2024	2025	2026	2027	
	Tujuan: Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	- Tingkat Kepuasan anggota DPRD adalah tingkat kepuasan anggota DPRD dalam fasilitasi yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD dengan diukur dari Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD. Diukur dari unsur-unsur sebagai berikut: - Fasilitasi Pembahasan Raperda diperoleh dari hasil survey fasilitasi pembahasan Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD atau inisiatif eksekutif sesuai Propemperda. - Peningkatan Kapasitas dan Tugas DPRD diperoleh dari hasil survey fasilitasi bimbingan teknis yang diikuti oleh anggota DPRD, koordinasi dan konsultasi, penyediaan tim ahli pakar dan tenaga ahli fraksi dalam satu tahun. - Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD diperoleh dari hasil survey pengawasan penggunaan anggaran (rapat dengar pendapat umum/monev/rapat Alat Kelengkapan DPRD, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan pelaksanaan reses - Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari survey pada pembahasan Pertanggungjawaban APBD, KUA-PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Perubahan APBD dan Pembahasan APBD	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD, IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	90,125	90,975		82	82,5	IKU
	Sasaran: Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD	Persentase Agenda Pembentukan Perda yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD	Rencana agenda pembentukan perda terdiri dari: - Fasilitasi Perda yang diajukan oleh eksekutif - Fasilitasi Perda	Jumlah agenda perda yang difasilitasi dibagi dengan jumlah agenda perda sesuai rencana kerja atau	100%	100%		100%	100%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target		Keterangan
					2023	2024	2025	2026	2027	
			yang diajukan oleh inisiatif DPRD	jadwal dikali dengan 100%						
		Persentase Agenda Pengawasan yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD.	Rencana agenda pengawasan terdiri dari: - Agenda Pengawasan Penggunaan Anggaran maupun pengawasan ke unit kerja - Agenda Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah - Agenda Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang telah difasilitasi dibagi dengan jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sesuai rencana kerja atau jadwal dikali 100%.	100%	100%		100%	100%	
		Persentase Agenda Penganggaran Daerah yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD.	Rencana Agenda penganggaran terdiri dari : - Agenda pembahasan APBD - Agenda pembahasan APBD Perubahan - Agenda pembahasan KUA dan PPAS - Agenda pembahasan KUA dan PPAS Perubahan - Agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah agenda penganggaran yang telah terfasilitasi dibagi dengan jumlah agenda penganggaran sesuai rencana kerja atau jadwal dikali 100%	100%	100%		100%	100%	
	Sasaran: Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Layanan Sekretariat DPRD terhadap eksternal dan internal (Contoh fasilitasi tamu dan pelayanan terhadap ke-sekretariatan)	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	90,1	89,90		82	82,5	

Tabel 3. 2
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
Misi : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BLITAR YANG BERKELANJUTAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERBASIS SMART GOVERNANCE				
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program
Tujuan: Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sasaran: Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD	1. Meningkatkan kualitas fasilitasi tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD melalui penguatan peran Sekretariat DPRD. 2. Meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPRD agar mampu mendukung kerja-kerja DPRD secara profesional, cepat, dan adaptif. 3. Mengembangkan sistem administrasi digital terintegrasi untuk mendukung transparansi, dokumentasi, dan akuntabilitas kerja DPRD. 4. Mengoptimalkan penyediaan tenaga ahli dan dukungan teknis lainnya dalam setiap proses legislasi, pembahasan anggaran dan pengawasan DPRD. 5. Meningkatkan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah/mitra kerja DPRD dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah.	1. Meningkatkan kemampuan responsif dan adaptif Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan agenda DPRD, melalui penguatan koordinasi, fleksibilitas operasional, dan pemanfaatan teknologi informasi. 2. Penguatan Kapasitas Lembaga Sekretariat DPRD • Dalam hal ini perlunya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD, terutama dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta kemampuan berdiplomasi dalam melakukan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD • Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD • Penyesuaian SOP dan kesiapan logistik kegiatan secara cepat dan fleksibel • Meningkatkan sistem koordinasi, komunikasi, dan informasi antar bagian sekretariat untuk respons cepat terhadap perubahan agenda 3. Pengembangan Sistem Pendukung Legislasi dan Pengawasan • Dalam mengembangkan sistem pendukung legislasi dan pengawasan perlu penyediaan dan peningkatan kualita tenaga ahli, staf pendamping alat kelengkapan DPRD serta penyediaan data dan dokumen kebijakan yang akurat • Penguatan sistem dokumentasi, risalah sidang, dan pelaporan berbasis digital. 4. Peningkatan Kualitas Fasilitasi Administratif dan Anggaran • Penyederhanaan proses administratif dan pembahasan anggaran (APBD) DPRD secara tepat waktu dan transparan. • Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah agar proses pembahasan raperda lebih efisien. 5. Peningkatan Keterbukaan dan Akuntabilitas Kinerja DPRD • Menyusun laporan kerja DPRD secara periodik dan dapat diakses publik. • Melaksanakan fasilitasi forum dengar pendapat dan penyerapan aspirasi masyarakat secara terstruktur.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Tabel 3. 3
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
1.	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Waktu penetapan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.	Jumlah perda APBD tahun N yang ditetapkan tepat waktu/jumlah perda APBD tahun N yang ditetapkan x 100%	100	100	100	100
2.	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Fasiliasi Raperda yang dibahas di Tahun N merupakan Fasilitas rancangan peraturan daerah dalam tahun N	Jumlah fasilitasi pembahasan propemperda berdasarkan tahun N dibagi jumlah Ranperda yang tertuang dalam tahun N x 100%	100	100	100	100

3.3. Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar

Rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Sekretariat DPRD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026, yaitu:

- a. RPJMD dan RKPD Kota Blitar Tahun 2026.
- b. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2026 adalah 2 program, 15 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Berikut uraian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 9 (sembilan) kegiatan:

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdapat 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Selanjutnya, dari program dan kegiatan – kegiatan diatas dapat diuraikan beserta sub kegiatan sebagaimana tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Sekretariat DPRD		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	02				SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	
4	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
4	02	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0010	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0011	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0013	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
4	02	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	
4	02	01	2.03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
4	02	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
4	02	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
4	02	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
4	02	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	
4	02	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
4	02	01	2.15	0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Mendukung capaian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					1. Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	IKK (Indikator Kinerja Kunci)
						Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	IKK (Indikator Kinerja Kunci)
4	02	02	2.01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	
4	02	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.08		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Layanan Administrasi Tugas DPRD sesuai Standart	
4	02	02	2.08	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
					2. Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran	
						Persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
4	02	02	2.02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai aturan	
4	02	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.02	0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.02	0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang Difasilitasi	
4	02	02	2.03	0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.03	0008	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD sesuai standart	
4	02	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.04	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.04	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.04	0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.04	0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	02	02	2.05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat Hasil Reses yang Ditindaklanjuti menjadi Dokumen Pokir	
4	02	02	2.05	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
4	02	02	2.05	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah.

4.1 Tabel Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2024

Tabel 4. 1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi dalam Pembahasan raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	- Dalam upaya meningkatkan fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD, maka akan disampaikan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas agar terdapat keseragaman administrasi sehingga pada semua kegiatan dapat memenuhi persyaratan administrasi - Dalam melaksanakan kegiatan pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD seluruh pelaksana kegiatan mendasarkan pada SOP yang berlaku. - Diperlukannya SOP pada seluruh pelaksanaan kegiatan pembahsan Raperda dan kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih detail	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Kegiatan Peningkatan kapasitas
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	- Sebagai upaya meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan maka akan dilaksanakan briefing sebelum pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran serta melakukan evaluasi di setiap akhir pelaksanaan, serta pemahaman terkait SOP fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran yang akan dilaksanakan TW 1 sampai TW 4. - Dalam pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran akan dilaksanakan sosialisasi terkait SOP pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran triwulan ke-1 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2025. Sehingga pada saat fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran tahun 2025 akan terlaksana lebih baik lagi. - Pada fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran akan dibuat standar pelayanan utamanya dalam pelaksanaan fasilitasi reses pada tahun 2025.	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD guna menunjang tugas dan fungsi DPRD	- Melakukan monitoring berjenjang terhadap capaian kinerja seluruh jajarannya secara optimal - Memberikan pengarahana dan mensosialisasikan hasil pengukuran kinerja untuk dapatnya dipahami oleh seluruh pegawai - Melakukan perbaikan skema crosscutting sehingga dapat terinformasikan hubungan aktivitas antar bagian dan tugas atau fungsi lain yang berkaitan - Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian maupun dalam penyesuaian strategi pencapaian kinerja - Melengkapi bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil monev capaian kinerja pada aplikasi sakiip - Melakukan monitoring berjenjang terhadap capaian kinerja seluruh jajaran secara optimal - Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berikutnya	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2 Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2026 adalah 2 program, 15 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sekretariat DPRD		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		36.991.260.038,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			36.435.436.348,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36.991.260.038,00				36.435.436.348,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD				36.991.260.038,00				36.435.436.348,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.619.480.209,00				21.078.956.610,00
					Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku		100 %	20.619.480.209,00			100 %	21.078.956.610,00
4	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	28.667.325,00			100 %	28.670.700,00
4	02	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	6.196.500,00			2 Dokumen	6.196.500,00
4	02	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17 Laporan	4.997.400,00			17 Laporan	4.999.200,00
4	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	4.830.000,00			1 Data	4.830.000,00
4	02	01	2.01	0010	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	4.999.200,00			1 Berita Acara	4.999.200,00
4	02	01	2.01	0011	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		13 Dokumen	2.844.225,00			13 Dokumen	2.845.800,00
4	02	01	2.01	0013	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		1 Berita Acara	4.800.000,00			1 Berita Acara	4.800.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.399.079.061,00			100 %	3.440.687.767,00
4	02	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		300 Orang/bulan	3.393.804.061,00			300 Orang/bulan	3.435.687.767,00
4	02	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	5.275.000,00			12 Laporan	5.000.000,00
4	02	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100 %	4.920.000,00			100 %	4.920.000,00
4	02	01	2.03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		10 Laporan	4.920.000,00			10 Laporan	4.920.000,00
4	02	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	267.805.800,00			100 %	264.251.000,00
4	02	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	59.125.000,00			3 Paket	55.569.000,00
4	02	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		25 Orang	208.680.800,00			25 Orang	208.682.000,00
4	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	843.978.400,00			100 %	944.703.700,00
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	51.048.500,00			1 Paket	51.076.000,00
4	02	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	95.896.900,00			4 Paket	95.921.600,00
4	02	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	46.105.400,00			5 Paket	46.129.700,00
4	02	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	51.520.000,00			1 Paket	51.520.000,00
4	02	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	36.219.000,00			1 Paket	36.222.800,00
4	02	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		48 Dokumen	21.954.000,00			48 Dokumen	21.954.000,00
4	02	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	257.986.000,00			12 Laporan	258.022.000,00
4	02	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	183.679.000,00			12 Laporan	183.960.000,00
4	02	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 Dokumen	99.569.600,00			100 Dokumen	199.897.600,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	623.410.200,00			100 %	399.490.110,00
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang <u>Disediakan</u>		0 Unit	0,00			0 Unit	0,00
4	02	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		52 Unit	187.721.600,00			52 Unit	100.000.000,00
4	02	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		46 Unit	435.688.600,00			10 Unit	249.490.110,00
4	02	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00			1 Unit	50.000.000,00
4	02	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	1.283.259.200,00			100 %	1.283.259.200,00
4	02	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	201.420.000,00			12 Laporan	201.420.000,00
4	02	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.081.839.200,00			12 Laporan	1.081.839.200,00
4	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	808.033.670,00			100 %	1.008.324.600,00
4	02	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	169.549.200,00			4 Unit	219.585.600,00
4	02	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	189.793.700,00			9 Unit	189.882.000,00
4	02	01	2.09	0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		68 Unit	49.813.000,00			68 Unit	49.939.200,00
4	02	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		89 Unit	182.397.770,00			89 Unit	182.397.800,00
4	02	01	2.09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	216.480.000,00			2 Unit	366.520.000,00
4	02	01	2.15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	13.360.326.553,00			100 %	13.704.649.533,00
4	02	01	2.15	0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		300 Orang/Bulan	12.895.774.453,00			300 Orang/Bulan	13.240.072.033,00
4	02	01	2.15	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		5 Paket	389.552.100,00			5 Paket	389.577.500,00
4	02	01	2.15	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		25 Orang	75.000.000,00			25 Orang	75.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.371.779.829,00				16.456.479.738,00
					1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan				11.438.480.979,00				11.510.246.088,00
						Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		100 %	8.318.322.434,00			100 %	9.045.639.838,00
						Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		100 %	3.120.158.545			100 %	2.464.606.250
4	02	02	2.01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi		100 %	3.120.158.545,00			100 %	15.356.479.738,00
4	02	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5 Dokumen	270.833.000,00			5 Dokumen	270.833.000,00
4	02	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		10 Dokumen	1.901.120.250,00			10 Dokumen	1.901.120.250,00
4	02	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		1 Dokumen	526.202.295,00			1 Dokumen	144.912.000,00
4	02	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		2 Dokumen	150.000.000,00			2 Dokumen	150.000.000,00
4	02	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		2 Dokumen	272.003.000,00			2 Dokumen	272.003.000,00
4	02	02	2.04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD sesuai standart		100 %	2.590.140.129,00			100 %	2.590.140.129,00
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		6 Dokumen	1.575.536.654,00			6 Dokumen	1.575.536.654,00
4	02	02	2.04	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		7 Orang	170.000.000,00			7 Orang	170.000.000,00
4	02	02	2.04	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		5 Orang	342.000.000,00			5 Orang	342.000.000,00
4	02	02	2.04	0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dokumen	72.369.675,00			1 Dokumen	72.369.675,00
4	02	02	2.04	0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		12 Dokumen	430.233.800,00			12 Dokumen	430.233.800,00
4	02	02	2.08		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Layanan Administrasi Tugas DPRD sesuai Standart		100 %	5.728.182.305,00			100 %	5.355.499.709,00
4	02	02	2.08	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		12 Dokumen	5.625.182.305,00			12 Dokumen	5.252.499.709,00
4	02	02	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 Laporan	103.000.000,00			1 Laporan	103.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
					2. Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan				4.933.298.850				4.946.233.650
						Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran		100 %	2.428.711.350			100 %	2.441.646.150
						Persentase Penyampaian Rekomendasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100 %	2.504.587.500			100 %	2.504.587.500
4	02	02	2.02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai aturan		100 %	2.504.587.500,00			100 %	2.504.587.500,00
4	02	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		2 Dokumen	485.390.100,00			2 Dokumen	482.953.600,00
4	02	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2 Dokumen	502.855.800,00			2 Dokumen	500.137.300,00
4	02	02	2.02	0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		2 Dokumen	507.019.000,00			2 Dokumen	512.174.000,00
4	02	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		2 Dokumen	502.439.500,00			2 Dokumen	502.439.500,00
4	02	02	2.02	0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		2 Dokumen	506.883.100,00			2 Dokumen	506.883.100,00
4	02	02	2.03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang Difasilitasi		100 %	724.260.100,00			100 %	722.363.600,00
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		12 Dokumen	269.139.500,00			12 Dokumen	249.616.800,00
4	02	02	2.03	0008	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 Dokumen	455.120.600,00			1 Dokumen	472.746.800,00
4	02	02	2.05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat Hasil Reses yang Ditindaklanjuti menjadi Dokumen Pokir		100 %	1.704.451.250,00			100 %	1.719.282.550,00
4	02	02	2.05	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		3 Dokumen	29.908.800,00			3 Dokumen	25.897.800,00
4	02	02	2.05	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	1.674.542.450,00			3 Dokumen	1.693.384.750,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan hasil perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar akan dilaksanakan secara terpadu dan sinkron antar kegiatan dengan kegiatan lain dalam satu program maupun kegiatan antar kegiatan pada program lain dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD Kota Blitar

Apabila dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2026 maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran maka Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya kegiatan.

3. Dilaksanakan Pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks, maka perlu adanya rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kota Blitar.
2. Sebagai fasilitator maka Sekretariat DPRD akan mengintensifkan koordinasi dengan DPRD untuk menciptakan kesepahaman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga tercipta harmonisasi antara Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar dalam mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan tetap berdominan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Setelah ditetapkan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2026, dan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga terwujud peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.